

## ANALISIS RESPONS GURU TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMA NEGERI 4 KOTA KUPANG

Novita Rambu<sup>1</sup>, Hidigardis M. I. Nahak<sup>2</sup>, Christine E. Meka<sup>3</sup>, Herman Y. Utang<sup>4</sup>  
[vrambu12@gmail.com](mailto:vrambu12@gmail.com)<sup>1</sup>, [nahakhildigardis@gmail.com](mailto:nahakhildigardis@gmail.com)<sup>2</sup>, [mekachristin@gmail.com](mailto:mekachristin@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[hermanutang@gmail.com](mailto:hermanutang@gmail.com)<sup>4</sup>  
Universitas Nusa Cendana

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis respons guru terhadap implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan berjumlah enam orang yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan empat guru yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan PPDB. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons guru terhadap sistem zonasi cenderung positif, terutama pada aspek administratif dan transparansi proses seleksi berbasis aplikasi daring. Guru menilai bahwa sistem zonasi membuat proses PPDB lebih tertib, objektif, dan mengurangi tekanan sosial dari orang tua calon peserta didik. Namun demikian, terdapat tantangan berupa keterbatasan kuota dan persaingan pendaftaran yang cepat, sehingga tidak semua calon siswa dalam zona terdekat dapat diterima. Selain itu, sistem zonasi meningkatkan heterogenitas kemampuan akademik siswa, sehingga guru perlu melakukan adaptasi metode pembelajaran untuk menjaga kualitas proses belajar mengajar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi sistem zonasi sangat dipengaruhi oleh disposisi dan kesiapan guru sebagai pelaksana kebijakan di tingkat sekolah.

**Kata Kunci:** Respons Guru, Sistem Zonasi, Implementasi Kebijakan Pendidikan, PPDB, Pemerataan Pendidikan.

### ABSTRACT

*This study aims to examine and analyze teachers' responses to the implementation of the zoning system in the New Student Admission (PPDB) process at SMA Negeri 4 Kota Kupang. The research employed a qualitative approach with a case study design. Six informants were selected purposively, consisting of the principal, the vice principal for student affairs, and four teachers who were directly involved in the PPDB implementation. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The data were analyzed interactively through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that teachers generally responded positively to the zoning system, particularly in terms of administrative order and transparency in the online-based selection process. Teachers perceived that the zoning system made the admission process more structured, objective, and less prone to social pressure from parents. However, several challenges were identified, including limited admission quotas and rapid competition during the registration process, which resulted in some students within the designated zone not being accepted. Furthermore, the zoning system increased the heterogeneity of students' academic abilities, requiring teachers to adapt their instructional strategies to maintain the quality of the learning process. This study concludes that the successful implementation of the zoning policy is strongly influenced by teachers' disposition and readiness as policy implementers at the school level.*

**Keywords:** Teachers' Response, Zoning System, Education Policy Implementation, Student Admission, Educational Equity.

### PENDAHULUAN

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan strategi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan melalui

prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Zonasi menempatkan domisili sebagai dasar seleksi utama dengan tujuan mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit (Cahyani dkk., 2020; Mahmud dkk., 2024). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari latar sosial ekonomi rendah (Hajaroh dkk., 2021; Werdiningsih, 2020). Namun demikian, berbagai tantangan implementasi masih ditemukan, seperti manipulasi domisili, keterbatasan daya tampung, dan kendala infrastruktur teknologi (Permini dkk., 2022; Safitri & Yusran, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas zonasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh respons aktor pelaksana di tingkat sekolah.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Sudiharto, 2020). Erlangga et al. (2023) menegaskan bahwa perencanaan sosial yang kurang matang dapat menyebabkan kebijakan hanya bersifat simbolik tanpa perubahan substantif. Di tingkat sekolah, guru menghadapi langsung dampak heterogenitas akademik akibat zonasi dan dituntut menyesuaikan strategi pembelajaran (Tina dkk., 2024). Dengan demikian, respons guru tidak hanya berupa sikap normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik pedagogik. Variasi respons dapat berbentuk dukungan, adaptasi, maupun resistensi, tergantung pada pemahaman dan pengalaman profesional guru terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peningkatan akses melalui zonasi tidak selalu diikuti oleh pemerataan mutu pendidikan. Sidik (2024) menemukan bahwa distribusi kualitas sekolah relatif tidak berubah secara signifikan pasca-zonasi, sementara Setiawan & Mustofa (2024) menegaskan bahwa aspek keadilan mutu belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks ini, guru menjadi aktor kunci dalam menjaga kualitas proses pembelajaran di tengah perubahan komposisi siswa. Persepsi dan sikap guru terhadap kebijakan merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman, komunikasi kebijakan, serta kepemimpinan sekolah (Azizan dkk., 2022; Rafsanjani dkk., 2024). Oleh sebab itu, analisis respons guru menjadi penting untuk memahami dinamika implementasi kebijakan secara lebih mendalam.

Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada evaluasi makro terkait pemerataan akses dan mutu (Rachmadhany & Matin, 2021). Kajian yang secara spesifik menggali respons guru pada jenjang sekolah menengah atas, khususnya di wilayah timur Indonesia, masih terbatas. Padahal, konteks geografis dan sosial budaya dapat memengaruhi implementasi kebijakan secara signifikan. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kasus.

Penelitian ini berfokus pada analisis respons guru terhadap implementasi sistem zonasi di SMA Negeri 4 Kota Kupang. Novelty penelitian terletak pada integrasi teori implementasi kebijakan, konstruksi sosial, dan evaluasi kebijakan dalam menganalisis respons guru sebagai pelaksana utama pendidikan. Dengan melibatkan enam informan kunci, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kontekstual mengenai dinamika penerimaan kebijakan zonasi di tingkat sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah respons guru terhadap implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 4 Kota Kupang? Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis respons guru terhadap penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi secara mendalam, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara teoretis dalam kajian implementasi kebijakan pendidikan serta secara praktis dalam penyempurnaan kebijakan zonasi yang lebih adaptif dan berkeadilan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis secara mendalam respons guru terhadap implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Studi kasus dipilih karena penelitian difokuskan pada satu satuan pendidikan, yakni SMA Negeri 4 Kota Kupang, sehingga memungkinkan eksplorasi kontekstual mengenai dinamika implementasi kebijakan di tingkat sekolah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan interpretasi guru sebagai pelaksana kebijakan, bukan untuk menguji hipotesis statistik. Fokus penelitian diarahkan pada respons guru terhadap perubahan komposisi siswa akibat sistem zonasi serta implikasinya terhadap proses pembelajaran.

Subjek penelitian berjumlah enam informan yang dipilih secara purposive sampling, terdiri atas satu kepala sekolah, satu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan empat guru. Kriteria pemilihan meliputi keterlibatan langsung dalam proses PPDB zonasi dan pengalaman mengajar minimal tiga tahun. Teknik purposive digunakan untuk memastikan informan memiliki pemahaman yang relevan dan mendalam terkait fokus penelitian. Jumlah informan dipertimbangkan memadai dalam penelitian kualitatif karena menekankan kedalaman data.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti (human instrument) dengan pedoman wawancara semi-terstruktur sebagai instrumen pendukung. Wawancara dirancang berdasarkan indikator teori implementasi kebijakan, meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sekolah. Selain wawancara mendalam, data dikumpulkan melalui observasi terbatas terhadap proses pembelajaran serta dokumentasi berupa arsip PPDB dan profil sekolah. Wawancara direkam dan ditranskripsikan secara verbatim untuk menjaga keakuratan data.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Data dikategorikan berdasarkan tema respons guru seperti dukungan, resistensi, adaptasi pedagogik, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member check kepada informan untuk memastikan validitas interpretasi. Dengan prosedur yang sistematis ini, penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan mengikuti tahapan pemilihan informan, teknik pengumpulan data, dan langkah analisis yang telah dijelaskan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Kontekstual Pelaksanaan Sistem Zonasi di SMA Negeri 4 Kota Kupang**

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Kota Kupang yang berlokasi di Jalan Adisucipto, Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Sekolah ini merupakan sekolah negeri yang berdiri sejak 30 Mei 1991 berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 0283/0/1991 dan memiliki akreditasi A. Secara geografis, sekolah terletak di tengah pemukiman masyarakat dengan akses yang mudah dijangkau. Kondisi ini relevan dengan implementasi sistem zonasi karena mayoritas peserta didik berasal dari wilayah sekitar sekolah.

Jumlah peserta didik tahun ajaran 2025 tercatat sebanyak 1.267 siswa yang tersebar pada tiga jenjang kelas, yaitu kelas X sebanyak 425 siswa, kelas XI sebanyak 423 siswa, dan kelas XII sebanyak 419 siswa. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 95 orang, yang terdiri atas guru PNS, guru non-PNS, dan tenaga administrasi. Sarana dan prasarana sekolah meliputi 44 ruang kelas, 4 laboratorium, ruang perpustakaan, ruang BK, ruang OSIS, serta fasilitas pendukung lainnya.

Kondisi kelembagaan ini menunjukkan bahwa SMA Negeri 4 Kota Kupang memiliki

kapasitas institusional yang memadai dalam mendukung pelaksanaan PPDB berbasis sistem zonasi.

## B. Deskripsi Karakteristik Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan enam informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Untuk menjaga etika penelitian, identitas informan disajikan dalam bentuk inisial sebagai berikut:

**Tabel 1.** Informan Penelitian

No	Inisial	Jabatan	Usia
1	FBL	Kepala Sekolah	54 Tahun
2	ZK	Wakasek Kesiswaan	57 Tahun
3	PR	Guru	56 Tahun
4	WS	Guru	46 Tahun
5	RB	Guru	43 Tahun
6	FBL-2	Kepala Sekolah (pernyataan lanjutan)	54 Tahun

*Sumber: Data Primer, 2026*

Seluruh informan memiliki pengalaman mengajar lebih dari sepuluh tahun dan terlibat langsung dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025/2026.

## C. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Zonasi

Pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Kupang dilakukan melalui lima jalur penerimaan, yaitu jalur zonasi, afirmasi, prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan perpindahan tugas orang tua. Jalur zonasi memiliki kuota terbesar dan menjadi jalur utama dalam seleksi peserta didik.

Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tahapan pelaksanaan meliputi:

1. Pengumuman jadwal dan persyaratan
2. Pendaftaran online
3. Verifikasi data dan dokumen
4. Penentuan zona berdasarkan jarak domisili
5. Pengumuman hasil seleksi
6. Registrasi ulang

Kepala sekolah (FBL) menyatakan:

“Sistem saat ini dibuat oleh pemerintah, jadi kita sebagai bawahan hanya mengikuti aturan yang dibuat oleh atasan. Selama proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi saat ini baik-baik saja karena sekarang sistem yang bermain.”

Wakasek kesiswaan (ZK) menambahkan:

“Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berlangsung lancar dan sesuai dengan juknis. Setiap tahapan mulai dari pengumuman, pemeriksaan dokumen, hingga penetapan kelulusan dapat dijalankan dengan tertib tanpa hambatan yang berarti.”

Data hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh tahapan administratif berjalan sesuai prosedur dan tidak ditemukan kendala teknis yang signifikan dari sisi internal sekolah.

## D. Respons Guru terhadap Implementasi Sistem Zonasi dalam PPDB

### 1. Respons Guru terhadap Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Zonasi

Sebagian besar guru menyatakan bahwa sistem zonasi mempermudah pelaksanaan PPDB dibandingkan sistem manual sebelumnya. FBL menyampaikan:

“Guru tidak ada tantangan karena sekarang sistem zonasi justru lebih membantu. Beban guru tidak ada karena semua peserta didik masuk melalui aplikasi.”

Guru merasa lebih tenang karena proses seleksi tidak lagi melibatkan interaksi langsung yang intens dengan orang tua calon siswa. Sistem berbasis aplikasi dinilai membuat proses lebih terstruktur dan mengurangi tekanan sosial.

## 2. Respons Guru terhadap Aspek Keadilan dan Keterbatasan Kuota

Meskipun sistem dinilai tertib, guru mengungkapkan adanya persoalan kuota dan persaingan pendaftaran. PR menyatakan:

“Dalam proses sistem zonasi ini ada kekurangan, yaitu rebutan untuk mendaftar. Siapa yang dahulu dia yang masuk.”

WS menambahkan:

“Kalau kuota sudah penuh, mereka tetap tidak masuk meskipun tinggal dekat.”

Data menunjukkan bahwa keterbatasan daya tampung menjadi faktor utama keluhan masyarakat. Calon siswa yang berada dalam zona yang sama tetap tidak diterima apabila kuota telah terpenuhi.

## 3. Respons Guru terhadap Dampak Zonasi terhadap Heterogenitas Siswa

Guru RB menyampaikan:

“Siswa yang masuk di sini dari berbagai latar belakang sosial dan kemampuan akademik yang berbeda. Kita harus menyesuaikan metode mengajar supaya semua dapat mengikuti pelajaran dengan baik.”

Temuan menunjukkan bahwa sistem zonasi meningkatkan keberagaman kemampuan akademik dan latar belakang sosial siswa. Guru menyatakan perlunya penyesuaian strategi pembelajaran agar proses belajar mengajar tetap efektif.

Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing agar siswa mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah.

## 4. Respons Guru terhadap Sistem Aplikasi dan Transparansi Seleksi

FBL-2 menyatakan:

“Pendaftaran PPDB sepenuhnya bergantung pada sistem aplikasi. Ini bukan milik sekolah, jadi semua tergantung aplikasi.”

Data menunjukkan bahwa proses seleksi bersifat otomatis dan berbasis sistem, sehingga sekolah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan hasil seleksi di luar mekanisme aplikasi. Guru menilai hal ini membuat proses lebih objektif dan mengurangi potensi intervensi eksternal.

## E. Sintesis Deskriptif Respons Guru terhadap Implementasi Zonasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, respons guru terhadap sistem zonasi dapat dirangkum dalam tiga kecenderungan utama:

1. Respons administratif positif, karena sistem lebih terstruktur dan mengurangi beban kerja.
2. Respons kritis terhadap keterbatasan kuota, yang menimbulkan keluhan masyarakat.
3. Respons adaptif pedagogik, berupa penyesuaian metode pembelajaran terhadap heterogenitas siswa.

Tabel berikut merangkum respons guru:

**Tabel 2.** Respons Guru terhadap Implementasi Zonasi

<b>Inisial Pernyataan Inti</b>	<b>Kategori Respons</b>
FBL Guru lebih tenang dan tidak terbebani	Positif-administratif
ZK Proses berjalan lancar sesuai juknis	Positif-prosedural
PR Terjadi persaingan cepat daftar	Kritis-kuota
WS Kuota penuh meskipun satu zona	Kritis-teknis
RB Perlu penyesuaian metode mengajar	Adaptif-pedagogik
FBL-2 Seleksi bergantung aplikasi	Objektif-transparan

*Sumber: Olahan Peneliti, 2026*

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi di SMA Negeri 4 Kota Kupang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Guru pada umumnya

memberikan respons positif terhadap sistem berbasis aplikasi karena dinilai lebih tertib, transparan, dan mengurangi tekanan sosial. Namun demikian, keterbatasan kuota serta meningkatnya heterogenitas siswa menjadi tantangan yang memerlukan penyesuaian dalam praktik pembelajaran.

Temuan ini sepenuhnya didasarkan pada data wawancara enam informan tanpa interpretasi atau analisis teoritis, sehingga menggambarkan kondisi empiris respons guru terhadap implementasi sistem zonasi dalam PPDB.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Respons Guru dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons guru terhadap implementasi sistem zonasi di SMA Negeri 4 Kota Kupang cenderung positif pada aspek administratif dan prosedural. Temuan ini sejalan dengan Cahyani et al. (2020) dan Mahmud et al. (2024) yang menyatakan bahwa sistem zonasi dirancang untuk menciptakan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam PPDB. Guru dalam penelitian ini menilai bahwa sistem berbasis aplikasi telah mengurangi beban administratif dan tekanan sosial dari orang tua, sehingga proses seleksi menjadi lebih tertib. Hal ini memperlihatkan bahwa dimensi komunikasi kebijakan dan struktur birokrasi berjalan relatif efektif sebagaimana dikemukakan Sudiharto (2020) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan mekanisme dan kepatuhan pelaksana.

Respons positif guru juga menunjukkan adanya disposisi pelaksana yang mendukung kebijakan. Permini et al. (2022) menegaskan bahwa disposisi implementor menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas kebijakan pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, guru tidak menunjukkan resistensi terbuka terhadap kebijakan zonasi, melainkan berupaya menyesuaikan diri dengan sistem yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara institusional, sekolah mampu menginternalisasi kebijakan sebagai bagian dari tata kelola pendidikan nasional.

Namun demikian, temuan penelitian juga memperlihatkan adanya respons kritis terkait keterbatasan kuota dan mekanisme “siapa cepat dia dapat”. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pemerataan dan realitas teknis di lapangan. Erlangga et al. (2023) menyebut kondisi ini sebagai potensi hiperrealitas kebijakan, di mana kebijakan tampak ideal secara konseptual namun menghadapi tantangan operasional. Dengan demikian, respons guru yang bersifat ambivalen terhadap aspek keadilan kuota memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan substantifnya.

### **B. Zonasi dan Pemerataan Akses Pendidikan**

Secara normatif, sistem zonasi bertujuan menciptakan pemerataan akses pendidikan. Werdiningsih (2020) dan Hajaroh et al. (2021) menegaskan bahwa zonasi memperluas kesempatan peserta didik dari berbagai latar sosial ekonomi untuk mengakses sekolah negeri terdekat. Temuan penelitian ini mendukung argumentasi tersebut, di mana guru mengakui bahwa siswa yang diterima berasal dari lingkungan sekitar sekolah dengan latar belakang yang lebih beragam.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerataan akses tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan mutu. Sidik (2024) menemukan bahwa distribusi kualitas input siswa tetap beragam meskipun zonasi diterapkan. Hal ini tampak dalam temuan bahwa guru harus menghadapi heterogenitas kemampuan akademik yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelum zonasi. Setiawan dan Mustofa (2024) juga menegaskan bahwa indikator aksesibilitas meningkat, tetapi keadilan mutu belum sepenuhnya tercapai.

Dengan demikian, penelitian ini menguatkan literatur sebelumnya bahwa zonasi

berhasil dalam aspek akses geografis, tetapi menimbulkan konsekuensi baru dalam pengelolaan kualitas pembelajaran. Respons adaptif guru terhadap heterogenitas siswa menjadi indikator penting bagaimana sekolah menjaga mutu pendidikan di tengah perubahan kebijakan.

### **C. Adaptasi Pedagogik Guru terhadap Heterogenitas Siswa**

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah meningkatnya keberagaman kemampuan akademik dan latar belakang sosial siswa. UMIATI et al. (2024) menyatakan bahwa implementasi zonasi menuntut sekolah melakukan penyesuaian strategi pembelajaran berbasis diferensiasi. Guru dalam penelitian ini menyatakan perlunya modifikasi metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti proses belajar secara optimal.

Temuan ini memperlihatkan bahwa respons guru tidak berhenti pada aspek sikap normatif, melainkan diwujudkan dalam adaptasi pedagogik. Dalam perspektif konstruksi sosial kebijakan (Rafsanjani et al., 2024), guru membangun makna kebijakan zonasi sebagai tantangan profesional yang harus direspons melalui inovasi pembelajaran. Respons ini menunjukkan bahwa guru berperan aktif sebagai agen perubahan dalam sistem pendidikan.

Azizan et al. (2022) dan Rochimat (2024) menekankan pentingnya kepemimpinan sekolah dalam mendukung adaptasi kebijakan. Dalam konteks SMA Negeri 4 Kota Kupang, dukungan struktural dan koordinasi panitia PPDB berjalan baik sehingga guru memiliki ruang untuk fokus pada pengelolaan pembelajaran. Dengan demikian, adaptasi pedagogik menjadi bentuk konkret kontribusi guru dalam menjaga kualitas pendidikan di tengah dinamika kebijakan zonasi.

### **D. Transparansi Sistem Aplikasi dan Reduksi Tekanan Sosial**

Penelitian ini menemukan bahwa sistem berbasis aplikasi daring mengurangi interaksi langsung antara guru dan orang tua calon siswa dalam proses seleksi. Safitri dan Yusran (2021) mengidentifikasi bahwa salah satu tujuan digitalisasi PPDB adalah meminimalisasi praktik intervensi dan meningkatkan transparansi. Temuan ini menunjukkan bahwa guru merasa lebih tenang dan profesional karena proses seleksi sepenuhnya ditentukan sistem.

Permini et al. (2022) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh dukungan teknologi yang memadai. Dalam penelitian ini, meskipun terdapat kendala jaringan dan kecepatan akses, secara umum sistem aplikasi dinilai efektif dalam menjaga objektivitas seleksi.

Namun, fenomena persaingan cepat daftar menunjukkan bahwa kesenjangan akses teknologi masih menjadi tantangan. Hal ini sejalan dengan temuan Hajaroh et al. (2021) yang menyebut bahwa faktor ekonomi dan akses teknologi dapat memengaruhi efektivitas kebijakan zonasi. Dengan demikian, digitalisasi PPDB menciptakan transparansi, tetapi juga berpotensi memunculkan ketimpangan baru jika tidak diimbangi dengan pemerataan infrastruktur.

### **E. Kontribusi Penelitian terhadap Kajian Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat argumentasi Sudiharto (2020) bahwa disposisi implementor merupakan determinan utama keberhasilan kebijakan publik. Respons guru yang dominan positif menunjukkan bahwa kebijakan zonasi dapat berjalan efektif apabila pelaksana memiliki penerimaan dan komitmen terhadap kebijakan tersebut.

Dari sisi kebaruan (novelty), penelitian ini mengisi kesenjangan literatur yang selama ini lebih banyak berfokus pada analisis makro pemerataan akses (Rachmadhany & Matin, 2021; Winarti et al., 2023). Penelitian ini menghadirkan perspektif mikro berbasis studi kasus di wilayah timur Indonesia, khususnya Kota Kupang. Konteks geografis dan sosial budaya daerah memberikan gambaran empiris yang berbeda dibandingkan wilayah lain.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan zonasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan guru dalam melakukan adaptasi pedagogik. Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk menghadapi heterogenitas siswa serta evaluasi kuota agar prinsip keadilan lebih optimal.

#### **F. Signifikansi, Implikasi, dan Batasan Penelitian**

Secara akademik, penelitian ini signifikan karena menunjukkan bahwa respons guru terhadap kebijakan zonasi bersifat multidimensional: administratif, pedagogik, dan sosial. Temuan ini memperkaya diskursus implementasi kebijakan pendidikan dengan menempatkan guru sebagai aktor sentral.

Implikasi praktis penelitian ini meliputi:

1. Perlunya penguatan kapasitas pedagogik guru dalam pembelajaran diferensiasi.
2. Evaluasi kebijakan kuota zonasi agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan.
3. Penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung akses pendaftaran daring.

Adapun batasan penelitian ini terletak pada jumlah informan yang terbatas pada satu sekolah sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga tidak mengukur dampak zonasi secara kuantitatif terhadap capaian akademik siswa.

Meskipun demikian, penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai respons guru terhadap implementasi sistem zonasi dan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada penerimaan serta adaptasi pelaksana di tingkat sekolah.

#### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis respons guru terhadap implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Kupang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa respons guru terhadap kebijakan sistem zonasi bersifat dominan positif, khususnya pada aspek administratif dan prosedural. Guru menilai bahwa sistem zonasi berbasis aplikasi daring telah membuat proses penerimaan peserta didik baru menjadi lebih tertib, transparan, dan terorganisir dibandingkan sistem manual sebelumnya. Mekanisme seleksi yang sepenuhnya bergantung pada sistem aplikasi juga dinilai mampu mengurangi tekanan sosial dari orang tua serta meminimalisasi potensi intervensi dalam proses penerimaan siswa.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya respons kritis terhadap keterbatasan kuota dan mekanisme seleksi berbasis kecepatan pendaftaran. Keterbatasan daya tampung sekolah menyebabkan tidak semua calon siswa yang berada dalam zona terdekat dapat diterima, sehingga memunculkan keluhan dari masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem zonasi telah meningkatkan transparansi dan keteraturan administratif, aspek keadilan substantif masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam pengaturan kuota dan kesiapan infrastruktur teknologi.

Dari sisi pedagogik, implementasi sistem zonasi berdampak pada meningkatnya heterogenitas kemampuan akademik dan latar belakang sosial siswa. Guru merespons kondisi ini dengan melakukan adaptasi metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti proses belajar secara optimal. Respons adaptif ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor profesional yang menjaga kualitas pembelajaran di tengah perubahan sistem pendidikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem zonasi sangat bergantung pada disposisi dan kesiapan guru sebagai pelaksana kebijakan di tingkat sekolah. Respons positif yang ditunjukkan guru menjadi faktor

pendukung utama dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan proses pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizan, N., Armanto, D., & Arafat, M. (2022). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Era Covid-19. *DIRASATUL IBTIDAIYAH*, 2(1), 71–83. <https://doi.org/10.24952/ibtidaiyah.v2i1.5622>
- Cahyani, A. P. S., H, P. A. A., & Nawangsari, E. R. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri Di kota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3), 1–6. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i3.23>
- Erlangga, R., Siany Indria Liestyasari, S. I., & Budiati, A. C. (2023). Hiperrealitas Perencanaan Sosial dalam Kebijakan Sistem Zonasi sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Karanganyar. *Literasi (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 14(3), 119. [https://doi.org/10.21927/literasi.2023.14\(3\).119-134](https://doi.org/10.21927/literasi.2023.14(3).119-134)
- Hajaroh, M., Nurhayati, R., Sidiq, F., Raharjo, A. S., & Sholikhah, E. (2021). School Zoning Policy and Equalization of Education Access for Poor Students in Yogyakarta City. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v6i2.9992>
- Mahmud, M., Fadlillah, F., Indriyani, T., Chaniago, F., Habibi, M. F., & Rosalina, D. W. (2024). Kebijakan Sistem Zonasi: Implementasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 7(1), 139. <https://doi.org/10.17977/um027v7i12024p139>
- Permini, N. L. P. E., Sedana, I. D. G. P., & Nugraha, I. K. W. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI SEKOLAH DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2021/2022 DI SMP NEGERI 3 GIANYAR. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 5(2), 295–300. <https://doi.org/10.47647/jsh.v5i2.970>
- Rachmadhany, F., & Matin, M. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di SMA Negeri 14 Bekasi. *Wahana*, 73(1), 84–98. <https://doi.org/10.36456/wahana.v73i1.2893>
- Rafsanjani, F. A., Budiati, A. C., & Liestyasari, S. I. (2024). Konstruksi Sosial Orang Tua terhadap Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.8527>
- Rochimat, H. (2024). Implementasi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kualitas Pendidik Berdasarkan Manajemen Strategik: (Studi Penelitian di Sekolah MAN 2 Kab Bandung). *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 776–786. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1408>
- Safitri, M. A., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 4(1), 92–100. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.436>
- Setiawan, M. W. A., & Mustofa, A. (2024). Evaluation of School Zoning Policy in Improving Accessibility and Quality of Education in Sidoarjo Regency. *Nawala Journal*, 1(5), 9–20. <https://doi.org/10.62872/1c6qed50>
- Sidik, F. (2024). Pelaksanaan Kebijakan Zonasi Sekolah Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama: Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Humanika*, 24(1), 47–56. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.68551>
- Sudiharto, S. (2020). Implementasi Kebijakan Budaya Tertib dan Disiplin Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 1 Gebog Kudus. *Al Hikmah: Journal of Education*, 1(1), 11–24. <https://doi.org/10.54168/ahje.v1i1.3>
- Tina, U., Lalu, S., Bagdawanyah, A., Zubair, Muh., & Purwantiningsih, A. (2024). Dampak Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di SMPN 5 Pringgabaya). *Learning Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(4), 860–871. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i4.3413>
- Werdiningsih, R. (2020). Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Masyarakat Pendidikan. *Public Service and Governance Journal*, 1(02), 181. <https://doi.org/10.56444/psgj.v1i02.1562>